

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
2. Tugas dan Fungsi : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan daerah

NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
TUJUAN			
I.	Tujuan 1: Mewujudkan transformasi digital pemerintah	Indeks Pemerintah Digital	- Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih karena merupakan ukuran nasional yang digunakan oleh Kementerian PANRB untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah Melaksanakan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai Indek Pemdi mencerminkan tingkat kematangan digital dari aspek tata kelola, kebijakan, layanan, dan infrastruktur pemerintahan digital. - Formulasi Pengukuran: (Nilai Subindeks Tata Kelola + Subindeks Kebijakan + Subindeks Layanan + Subindeks Infrastruktur)÷4 (Skor penilaian nasional hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap penyelenggaraan pemerintahan digital daerah)

			• Satuan: Angka • Tipe Penghitungan: Kuantitatif (Skor penilaian nasional hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap penyelenggaraan pemerintahan digital daerah). • Perangda Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga • Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pemerintahan Digital oleh Kementerian PANRB, serta data pendukung hasil pengisian evaluasi internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
SASARAN			
1.	Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital	Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Tingkat integrasi aplikasi menjadi tolok ukur penting keberhasilan transformasi digital pemerintahan, sekaligus mendukung peningkatan nilai Indeks Pemerintahan Digital serta penerapan SPBE di Kabupaten Purbalingga.

			• Formulasi Pengukuran (Jumlah aplikasi yang terintegrasi : Jumlah seluruh aplikasi yg digunakan) X 100 • Satuan: Persentase • Tipe Penghitungan: Kuantitatif (rasio) – menggambarkan proporsi aplikasi yang telah terintegrasi antar-perangkat daerah terhadap total aplikasi yang digunakan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. • Perangda Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga • Sumber Data: Hasil pendataan dan perhitungan internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (data aplikasi pemerintahan dan status integrasi antar-sistem).
2.	Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	• Alasan Pemilihan Indikator: Didasarkan pada mandat konstitusi, sebagaimana yang diamatkan dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu juga sebagai upaya untuk mengukur sejauh mana badan publik melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai amanat Undang-Undang

			Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pemilihan indikator keterbukaan informasi publik dilakukan untuk: - Mengukur komitmen, pelaksanaan, dan hasil nyata keterbukaan informasi. - Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. - Mendorong badan publik agar berinovasi dan adaptif terhadap era digital. - Membentuk budaya keterbukaan sebagai bagian dari pelayanan publik yang baik. ● Formulasi Pengukuran: Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan Evaluasi keterbukaan informasi publik terhadap badan publik tingkat kabupaten dengan tahapan penilaian yang terdiri dari: 1. Tahap 1: Penilaian Website dan Media Sosial Badan Publik atau PPID 2. Tahap 2: Pengisian SAQ (Self Assessment Questionnaire) secara online 3. Tahap 3: Visitasi dan Verifikasi Dokumen 4. Tahap 4: Uji Publik ● Satuan: Angka ● Tipe Penghitungan: Non Kumulatif
--	--	--	--

			• Perangkat Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga - Sumber Data: Komisi Informasi Provinsi
3.	Meningkatnya publikasi data sektoral	Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun	• Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih dikarenakan publikasi data mencerminkan tingkat keterbukaan, integrasi, dan kematangan pengelolaan data • Formulasi Pengukuran: (Jumlah data yg terupload : daftar data prioritas) X 100% • Satuan: angka • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Perangkat Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga • Sumber Data: Kabupaten Purbalingga
4.	Terwujudnya keamanan informasi pemerintah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keamanan informasi daerah

			• Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$ • Satuan: Angka • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga • Sumber Data: BSSN
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DINKOMINFO	Nilai SAKIP DINKOMINFO	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator nilai SAKIP mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan serta menjadi dasar evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan • Formulasi Pengukuran: Release LHE SAKIP dari Inspektorat • Satuan: Angka

			• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga • Sumber Data: LHE SAKIP dari Inspektorat
--	--	--	---

Purbalingga, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

R. BUDI SETIAWAN, S.E., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750417 201001 1 011